

### 6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup :

(a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Secara umum, strategi kebijakan pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015, yang merupakan “*grand strategy*” dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

- ✚ Menciptakan keselarasan antara pertumbuhan dan pemerataan, atau *Growth with Equity* dengan mempertimbangkan pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan sesuai dengan fokus pembangunan nasional yaitu *Pro-growth, Pro-poor, Pro-Job* serta *Pro-environment*.
- ✚ Menyelenggarakan reformasi institusional, mekanisme dan kinerja pelayanan pemerintahan sebagai institusi publik berdasarkan prinsip *good governance* dan *clean government* agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- ✚ Melaksanakan upaya percepatan pembangunan yang diarahkan pada pengembangan aktifitas sektor riil dan sektor ekonomi unggulan dengan mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan local

- ✚ Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dan akomodatif serta kolaboratif sebagai mitra kerja pemerintahan dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah.
- ✚ Mendorong pemerataan pembangunan maupun hasil-hasilnya melalui program satu milyar satu kecamatan (SAMISAKE). Kebutuhan dan potensi serta permasalahan satu kecamatan akan berbeda dengan kecamatan lainnya. Melalui strategi program satu milyar satu kecamatan ini, diharapkan dapat menjaring aspirasi dari bawah, dapat mengatasi akar permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi masing-masing kecamatan, yang pada gilirannya akan terwujud kemandirian dari kecamatan.
- ✚ Mendorong percepatan pembangunan Infrastruktur, baik pembangunan jalan dan jembatan yang mampu memperpendek jarak dari daerah produksi ke daerah pusat-pusat distribusi serta pembangunan jaringan listrik, irigasi dan air bersih.

## **6.2. ARAH KEBIJAKAN**

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi menitik beratkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan pembangunan diperlukan adanya grand strategi daerah yang kemudian akan menetapkan menjadi arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Jambi merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan nasional (RPJM Nasional) dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat Provinsi Jambi.

Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Jambi periode tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan umum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan

ekonomi yang didukung oleh pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan beberapa program yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan pangan serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi pembangunan yang berkeadilan termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan ketimpangan pembangunan antar daerah, dan diskriminasi gender. Dalam hal ini penegakan hukum yang bersih, adil dan tidak pandang bulu.
3. Arah Kebijakan umum untuk Tata kelola pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien.

Dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Jambi, sesungguhnya lebih menekankan pada sinergitas dari kebijakan nasional menjadi kebijakan Provinsi Jambi dengan mengedepankan pada penanganan berdasarkan pada fungsi pelayanan umum. Selain itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jambi 2005 - 2025 disebutkan bahwa salah satu misi pembangunan Provinsi Jambi adalah mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan secara bertahap, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat

terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, dan menghapuskan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk diskriminasi gender.

Oleh karenanya, dalam menyelenggarakan pembangunan kewilayahan lebih diarahkan pada : 1) Mengalokasikan penggunaan ruang di Provinsi Jambi (pola ruang) dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan; 2) Pengembangan sarana prasarana yang diarahkan pada upaya mempererat keterkaitan spasial antar kawasan (struktur ruang); 3) Mengakselerasi pertumbuhan wilayah yang potensial untuk tumbuh, menjaga pertumbuhan pada kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan pertumbuhan wilayah dalam satuan ruang; dan 4) Mendorong pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi berdasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada.

Adapun Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jambi yang dituangkan dalam kajian spasial, meliputi:

**1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Barat-Tengah dan Timur Provinsi Jambi, melalui:**

- a. Pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer, kereta api dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan.

Pengembangan sarana prasarana transportasi yang akan dikembangkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan dalam wilayah Provinsi Jambi harus dilakukan dengan mengacu pada studi kelayakan dan kajian dampak lingkungan sehingga pembangunannya tetap mampu menciptakan keseimbangan.

- b. Peningkatan akses kawasan budi daya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer.
  - c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pelayanan berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN, PKW dan PKL.
  - d. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di wilayah Barat, Tengah dan Timur melalui pengolahan produk perkebunan, pertambangan dan perikanan.
2. **Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah**, melalui:
- a. Peningkatan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
  - b. Peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan.
  - c. Peningkatan dan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya.
  - d. Peningkatan dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan.
  - e. Peningkatan dan pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.
3. **Optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah**, melalui:
- a. Pengembangan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada.

- b. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan.
  - c. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha ekonomi produktif.
  - d. Pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.
  - e. Pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.
4. **Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah**, melalui:
- a. Pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi sesuai criteria dan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. Pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun dan Perkotaan Muara Bulian sesuai arahan RTRWN.
  - c. Peningkatan dan Penetapan Kota Sungai Penuh, Perkotaan Bangko, Perkotaan Muara Sabak, Perkotaan Muara Tebo, Perkotaan Sengeti menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKW) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
  - d. Penetapan Sanggaran Agung, Siulak Mukai, Muara Tembesi, Pelabuhan Dagang, Nipah Panjang, Wiroto Agung, Rantau Ikil, Pelawan, Teluk Nilau, Sungai Abang, Batang Sangir, Sungai Okan, Limbur Tembesi, Pauh, Teluk Serdang, Rantau Panjang, Pamenang, dan Tempino menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

- e. Peningkatan dan penetapan fungsi pusat-pusat kegiatan lainnya di 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) Kota dalam Provinsi Jambi yang memenuhi kriteria pusat pelayanan.
5. **Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan**, melalui:
- a. Pemantapan fungsi kawasan lindung Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, Kota Jambi dan Sarolangun.
  - b. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Provinsi Jambi.
  - c. Sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Sarolangun.

Arahan pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, yang didasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada maka di arahkan sebagai berikut :

1. Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo mempunyai peranan dan fungsi untuk perkebunan; peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan kawasan konservasi.
2. Kabupaten Batanghari mempunyai peranan dan fungsi untuk perdagangan dan jasa regional; industry pengolahan; perkebunan; peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan kawasan konservasi.
3. Kabupaten Muara Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk penyangga ibukota Provinsi; perdagangan dan jasa regional; industry

- pengolahan; perkebunan; peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan perumahan skala besar
4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan ; Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan; Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan.
  5. Kabupaten tanjung Jabung Timur mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan ; Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan; Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan; dan kawasan konservasi
  6. Kota Kerinci mempunyai peranan dan fungsi untuk Pelayanan Pariwisata; Pendidikan; dan kawasan konservasi.
  7. Kota Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk Pemerintahan Provinsi; Perdagangan dan jasa regional; pusat distribusi dan kolektor barang dan jasa; Industri; transportasi; pendidikan tinggi; dan perumahan skala besar

Sebagai tindak lanjut dalam mengimplentasikan grand strategi dan arah kebijakan umum, dirumuskan strategi dan arah kebijakan implementasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun. Adapun Strategi dan arah Kebijakan pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 berdasarkan pada tujuan, sasaran adalah sebagai berikut :



Tabel 6.1  
**Matrik Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan  
Provinsi Jambi tahun 2010 – 2015**

<b>VISI : Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera</b>			
<b>MISI I : Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Jambi dengan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik	1. Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur	1. Pemenuhan fasilitas infrastruktur pelayanan umum	1. Meningkatkan akses antara pusat-pusat permukiman dengan daerah belakang nya (hinterland), meningkatkan akses ke wilayah-wilayah potensial/sentra produksi yang masih terisolir dan meningkatkan akses ke pasar internasional
			2. Pengembangan sistem prasarana transportasi terpadu, prasarana transportasi yang akan dikem-bangkan untuk mendukung penin-katan pertumbuhan wilayah Jambi secara serasi dengan wilayah-wilayah lainnya
			3. Meningkatkan akses ke wilayah-wilayah potensial/ sentra produksi yang masih terisolir dan mening-katkan akses ke pasar internasional
			4. Pengembangan bandara sebagai salah satu landasan internasional di Sumatra

		2. Penyelenggaraan pembangunan fasilitas layanan transportasi daerah dan antar wilayah	1. Tersedianya infrastruktur pedesaan melalui pendekatan kewilayahan dalam rangka per-cepatan pembangunan desa tertinggal
			2. Pengembangan Prasarana transportasi yang akan mendukung pemerataan pembangunan intra wilayah di Provinsi Jambi yang ditunjang dengan sistem prasarana transportasi sungai
			3. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu: penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, fasilitas dan rambu jalan, penegakan hukum dan disiplin di jalan
		3. Pengembangan dan penataan fasilitas infrastruktur yang telah dibangun	1. Mensinergiskan sistem infrastruktur dengan konsep tata ruang wilayah
			2. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah
			3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan non formal milik pemerintah
	2. Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik	1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan terbarukan	1. Pengembangan Energi Men-ciptakan alternatif dari Potensi setempat dan Mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan

			<p>2. Pemulihan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta keandalannya terutama di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan</p> <p>3. Peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumberdaya energi</p>
	3. Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih	1. Ketersediaan jaringan irigasi dan kebutuhan air bersih yang merata	<p>1. Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendaya gunaan</p> <p>2. Pendayagunaan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi</p> <p>3. Pendayagunaan sumberdaya air sebagai pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis</p>
		2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air sebagai pendukung sistem jaringan irigasi di wilayah potensi	<p>1. Penyelenggaraan Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berbasis partisipasi masyarakat</p> <p>2. Penataan system irigasi dalam mendukung peningkatan peman-faan lahan dan produksi pertanian</p>

			3. Meningkatkan upaya pengendalian kecenderungan alih fungsi lahan, dengan mengoptimalkan sistem jaringan irigasi yang telah ada dan yang akan dibangun
	4. Terpenuhinya pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan	1. Menciptakan kualitas dan kuantitas kebutuhan umum perumahan dan permukiman	1. Pemenuhan dan peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman
			2. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan dan pesisir
			3. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat
			4. Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat
		2. Meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi	1. Penyelenggaraan sarana dan prasarana pendidikan secara merata sebagai kebutuhan pelayanan dasar masyarakat luas
			2. Peningkatan ketersediaan jaringan transportasi dalam mendukung mutu pendidikan pada wilayah-wilayah terpencil dan sulit terjangkau

		3. Pemenuhan fasilitas infrastruktur pelayanan kesehatan secara merata	<p>1. Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan kesesuaian sarana prasarana dan tenaga medis secara merata</p> <p>2. Pendayagunaan akses pelayanan kesehatan melalui penyediaan mobilisasi kesehatan</p>
<b>Misi II : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya	1. Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas	1. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pendidik dengan mengikuti standar pendidikan nasional	<p>1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program WAJAR Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas</p> <p>2. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik</p>

		<p>2. Penataan sistem pendidikan dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan yang didasari oleh indikator pendidikan yang lebih baik</p>	<p>1. Menyempurnakan manajemen pendidikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan</p> <p>2. Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat (miskin, daerah terpencil/ konflik, penyandang cacat)</p> <p>3. Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip keadilan, efisien, transparan dan akuntabel untuk melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas</p>
	<p>2. Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam mewujudkan prestise daerah</p>	<p>1. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia</p>	<p>1. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi dan kualitas manusia daerah Jambi</p> <p>2. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan</p> <p>3. Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga dalam memacu prestasi dan prestise daerah</p>

	3. Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan social	1. Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial</p> <p>2. Meningkatkan kualitas manajemen dan sumberdaya manusia pelayanan kesejahteraan sosial</p> <p>3. Mengembangkan dan menyetarakan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial</p> <p>4. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial</p>
	4. Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	<p>1. Pengembangan jaminan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu</p> <p>2. Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini</p> <p>3. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar</p> <p>4. Peningkatan sosialisasi terhadap kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat pada masyarakat</p> <p>5. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis secara merata</p>

	<p>5. Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas serta penataan administrasi kependudukan yang baik dalam upaya mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk yang disesuaikan dengan daya tampung alam dan lingkungan</p>	<p>1. Meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan</p>	<p>1. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan KB</p> <p>2. Memperkuat kelembagaan dan jaringan KB dalam meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas</p> <p>3. Menata kebijakan administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk, dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik</p>
	<p>6. Terwujudnya kualitas kehidupan beragama melalui peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat serta terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama</p>	<p>1. Mengembangkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta mengembangkan upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat</p>	<p>1. Revitalisasi FKUB sehingga dapat menjadi lembaga yang optimal bagi para tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama</p> <p>2. Optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang ada dan berkembang di masyarakat</p>



	7. Terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan	1. Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya daerah	1. Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas Provinsi Jambi 2. Mengembangkan modal sosial dengan mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan 3. Menjadikan budaya lokal sebagai salah satu alat promosi daerah dengan mengedepankan budaya leluhur
<b>Misi III : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Jambi dengan Struktur Ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi	1. Menciptakan kondusifitas iklim investasi dan pendapatan daerah serta ekonomi daerah yang lebih baik	1. Penyederhanaan prosedur, perijinan yang menghambat kelancaran arus barang dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan dan pasar domestik 2. Mengintegrasikan pengembangan usaha sesuai dengan karakteristik daerah dan pengusaha serta potensi usaha di setiap daerah lingkup Provinsi Jambi
	2. Tercapainya stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan	1. Tercapainya kondisi makro ekonomi yang stabil dengan peningkatan sektor ekonomi secara merata	

			<p>2. Menjaga stabilitas perekonomian daerah yang dasari oleh capaian indikator ekonomi</p> <p>3. Menciptakan inovasi baru dalam rangka memperkuat struktur perekonomian daerah dengan berbasis pada agro industri dan agribisnis dengan mengedepankan IPTEK</p>
	<p>3. Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah</p>	<p>1. Peningkatan daya saing BUMD dalam pembangunan daerah</p>	<p>1. Memantapkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), (transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas) dalam pengelolaan BUMD</p>
	<p>4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat</p>	<p>1. Menciptakan Pemenuhan Kecukupan pangan daerah</p>	<p>1. Penyempurnaan sistem penyediaan dan distribusi pangan secara merata dengan harga terjangkau</p> <p>2. Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan</p> <p>3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat</p>

			4. Peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan
		2. Meningkatnya produktivitas usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas	1. Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi
			2. Mengembangkan UKM dengan pendekatan klaster pada sektor agribisnis dan agroindustri yang didukung adanya pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif
			3. Mengembangkan UKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM
			4. Meningkatkan sistem dan strategi dalam menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
			5. Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif

		<p>3. Menciptakan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dari meningkatnya peran sektor pertanian dan non pertanian yang terkait dalam mata rantai pengolahan produk-produk berbasis perdesaan</p>	<p>1. Mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian, merangsang pertumbuhan aktivitas ekonomi non pertanian (industri perdesaan), dan memperkuat keterkaitan kawasan perdesaan dan perkotaan</p> <p>2. Memperluas akses masyarakat, terhadap sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha</p> <p>3. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian di perdesaan melalui peningkatan kualitas dan kontinuitas suplai berbasis sumber daya lokal</p>
	<p>5. Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)</p>	<p>1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar melalui institusi dan lembaga sosial secara transparan</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial</p> <p>2. Meningkatkan kualitas manajemen dan sumberdaya manusia pelayanan kesejahteraan sosial</p> <p>3. Mengembangkan dan menyetarakan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial</p>

			4. Meningkatnya mutu manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial
			5. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak
	6. Perbaiki iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran	1. Terselenggaranya upaya-upaya untuk penurunan tingkat pengangguran	1. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi
			2. Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, out-sourcing, pengupahan, PHK serta jaminan keselamatan kerja
			3. Meningkatkan kualitas SDM ketenagakerjaan melalui pembekalan teknis dan peningkatan wawasan kerja
	7. Terwujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kualitas pelayanan dan pemahaman serta kehidupan beragama	1. Menciptakan upaya peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama Serta Kehidupan Beragama
			2. Meningkatkan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama
	8. Terselenggaranya promosi daerah melalui peningkatan Kepariwisata daerah	1. Menjadikan kepariwisataan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah	1. Meningkatkan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri

			<p>2. Optimalisasi dan sinkronisasi da-lam pengelolaan jasa pelayanan pariwisata, terutama yang meli-batkan lebih dari satu moda transportasi</p> <p>3. Peningkatan, pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah dengan peran serta pelaku usaha dan masyarakat</p>
	9. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	1. Menciptakan pusat per-tumbuhan wilayah yang berdaya saing	<p>1. Mengembangkan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah-wilayah yang tertinggal</p> <p>2. Meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya</p>
<b>Misi IV : Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Menciptakan Pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan	1. Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan	1. Terwujudnya Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya Alam, Lahan dan Tambang	1. Menyelenggarakan revitalisasi pertanian untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan

ruang dan lingkungan		<p>2. Pengamanan ketahanan pangan</p> <p>3. Peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan</p> <p>4. Pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu</p>
	<p>2. Menyelenggarakan penanganan dan pengelolaan sumberdaya alam dengan menjaga kelestarian lingkungan yang baik</p>	<p>1. Mencapai kesepakatan antar tingkat pemerintahan dalam hal pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan serta penetapan kawasan hutan pada penataan ruang wilayah sesuai dengan peran dan fungsinya</p> <p>2. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan</p> <p>3. Memanfaatkan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungannya secara optimal</p> <p>4. Penetapan kawasan hutan dalam tata ruang sesuai dengan peran dan fungsinya</p>

			<p>5. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya</p> <p>6. Penerapan iptek yang inovatif pada sektor kehutanan</p>
	<p>2. Terciptanya pemanfaatan potensi tambang skala kecil dan besar</p>	<p>1. Membuka peluang usaha tambang dengan didukung oleh aspek lingkungan dan sosial</p>	<p>1. Memperketat persyaratan reklamasi pasca tambang perusahaan pertambangan</p>
			<p>2. Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup</p>
		<p>2. Mengurangi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta resiko Bencana Alam</p>	<p>3. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek lingkungan hidup</p>
			<p>1. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana</p>



			2. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup
		3. Peningkatan pengelolaan ekosistem wilayah pesisir dan hasil produksi perikanan	1. Mengelola sumber daya kelautan secara lestari
			2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya kelautan
	3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Pengurangan emisi dan peningkatan serapan dan simpanan karbon dari kegiatan konservasi hutan, pengelolaan hutan lestari dan restorasi ekosistem	1. Peningkatan kualitas dan efektivitas kebijakan dan program konservasi untuk mencapai kemantapan pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung
			2. Peningkatan upaya reboisasi hutan di kawasan hutan terdeforestasi secara transparan, akuntabel dan partisipatif, terutama di dalam kawasan hutan
			3. Menciptakan perencanaan pembangunan pada sektor pertanian dan perkebunan, proyeksi perluasannya dan pemberian ijin tidak pada kawasan hutan dan kawasan lain yang memiliki tutupan hutan yang masih dalam keadaan baik

	4. Penerapan tata ruang wilayah sebagai acuan kebijakan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan	1. Terciptanya sinkronisasi operasional penataan ruang wilayah	1. Mensinergiskan konsep penataan ruang Provinsi Jambi dengan RTRW Nasional dan RTRW Kabupaten/Kota sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah) 2. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan keseimbangan pembangunan antar fungsi 3. Mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan tata ruang yang berpedoman pada produk hukum daerah
<b>MISI V : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Kualitas Kinerja Birokrasi Pemerintah secara Profesional dalam Memenuhi Kepentingan Umum	1. Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik	1. Terciptanya perencanaan pembangunan yang berkualitas	1. Menciptakan kondisi kerja yang baik yang didukung dengan kemampuan SDM perencana yang berkualitas dalam mengimplemen-tasikan dokumen perencanaan secara sinergi sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Terselenggaranya koordinasi perencanaan lingkup pemerintahan baik Pusat dan Daerah

			3. Tersusunnya konsep perencanaan yang berkualitas dengan didasari oleh analisa study yang baik
		2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur di semua sektor sehingga pelaksanaan birokrasi pemerintahan dapat diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan etos kerja birokrasi serta budaya kerja yang memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Pemerintah Daerah, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju pencapaian good governance dan clean government yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparatur
			2. Pembentukan birokrasi yang profesional dengan membangun aparatur pemerintah Provinsi Jambi yang memahami etika birokrasi dan budaya kerja, pemahaman terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta penerapan komitmen percepatan pemberantasan KKN
			3. meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi
			4. Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, fungsional, DPRD, dan pengawasan masyarakat

		<p>3. Mewujudkan kelembagaan dan ketata laksanaan pemerintahan, serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi</p>	<p>1. Perbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui optimalisasi sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan</p> <p>2. Pengelolaan pendapatan daerah yang menekankan pada keserasian antara kebutuhan pengeluaran dan pendapatan</p> <p>3. Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, hierarki pendek, bersifat jejaring, fleksibel dan adaptif, diisi banyak jabatan fungsional, dan terdesentralisasi kewenangannya, sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat dengan lebih baik dan efisien, serta berhubungan kerja antar tingkat pemerintah, dengan DPRD, masyarakat, dan lembaga non pemerintah secara optimal sesuai dengan peran dan fungsinya</p> <p>4. Pengembangan sistem informasi terpadu (e-government) yang dapat memperlancar dan meningkatkan mutu layanan</p>
	<p>2. Terwujudnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum</p>	<p>1. Menciptakan budaya kerja yang berdasarkan pada ketaatan akan hukum dan perundang-undangan</p>	<p>1. Menghormati supremasi hukum, melalui perilaku keteladanan aparatur pemerintahan dalam mematuhi dan menaati hukum</p>

			2. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan
			3. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil
	3. Terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1. Membaiknya angka GDI (Gender-related Development Index) dan angka GEM (Gender Empowerment Measurement)	1. Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, dengan ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat
			2. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
			3. Memperkuat koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi

			<p>4. Pembinaan aparatur yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum, penerapan dan penegakan hukum dan HAM, perlindungan hukum, kesadaran hukum dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tertib, teratur dan lancar</p>
--	--	--	---